

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan manusia didefinisikan oleh UNDP (1990) sebagai proses untuk memperluas pilihan – pilihan bagi penduduk dimana penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan sedangkan upaya – upaya dalam pembangunan merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Selain infrastruktur negara, modal, dan sumber – sumber daya alam, negara juga harus mengembangkan keahlian dan pengetahuan rakyatnya dalam pembangunan. Pembangunan manusia memiliki tujuan untuk kemajuan suatu negara, dimana kualitas SDM yang baik akan membantu negara memaksimalkan segala sumber daya yang ada agar mencapai kemakmuran yang berkelanjutan.

Tidak adanya pembangunan manusia membuat suatu negara tidak akan dapat mengembangkan apapun (Todaro, 2000). Pembangunan manusia harus dilakukan guna mencetak sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang baik dan memadai maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dalam berbagai sektor. Pemerintah hendaknya memperhatikan hal tersebut terlebih jika memandang manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, sehingga pembangunan manusia akan menunjang pembangunan di berbagai sektor. Hal ini akan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia yang berada dalam wilayah pemerintahan tersebut.

Pembangunan manusia merupakan hal yang penting terutama bagi negara khususnya negara yang sedang berkembang. Hal ini disebabkan karena banyak negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi namun masih gagal dalam menghadapi masalah kesenjangan sosial dan kemiskinan yang tinggi. Selain itu pembangunan manusia sebenarnya merupakan investasi tidak langsung terhadap pencapaian tujuan perekonomian nasional. Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan, terutama di negara - negara yang paling miskin, kualitas hidup dinilai dari pendapatan yang lebih tinggi, namun pendapatan yang lebih tinggi hanya merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi.

Banyak hal lain yang harus diperjuangkan, pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individual, dan pelestarian ragam kehidupan budaya (Usmaliadanti, 2011). Pembangunan manusia dapat dilihat dari IPM yang didalamnya terdapat faktor pendidikan dan kesehatan. Kedua faktor ini memiliki fungsi penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas. Sektor pendidikan berperan dalam memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, skill, serta membentuk kepribadian, dilengkapi dengan sektor kesehatan yang berperan menciptakan hidup sehat, umur panjang dan meningkatkan produktivitas manusia.

Untuk mencapai IPM yang maksimal diperlukan peranan pemerintah dalam menciptakan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif. Investasi pada modal manusia diharapkan akan

berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan.

Investasi modal manusia ini yang mencakup pengembangan sumber daya manusia membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dalam mendorong peningkatan kualitas SDM (Usmaliadanti, 2011). Menurut Mankiw (2008), pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Hasil IPM yang baik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif karena dibekali pengetahuan dan keterampilan, terciptanya pimpinan terdidik dalam perusahaan maupun organisasi yang akan mengurangi tenaga kerja asing dalam negeri, serta tersedianya kesempatan kerja dengan pendapatan yang baik.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkelanjutan berarti suatu daerah telah memiliki fundamental pembangunan sumber daya manusia yang tangguh serta dapat dijadikan sebagai salah satu kekuatan untuk menghadapi berbagai ancaman baik dari luar maupun yang datang dari dalam daerah itu sendiri. Salah satu ancaman tersebut dapat berupa perdagangan bebas, dimana Indonesia akan melakukan kerja sama perdagangan dengan negara asia lainnya yang dikenal dengan Asian Economic Community pada tahun 2015. Untuk itu, perlu suatu sistem dan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang baik.

Sumatera Barat pada tahun 2010 – 2016 menempati urutan ke 9 dalam IPM secara nasional dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Berada di urutan ke 3 di pulau sumatera dari 10 provinsi. Secara umum IPM Sumatera Barat meningkat naik dalam lima tahun terakhir dan selalu berada diatas rata – rata IPM di

Indonesia, ini berarti pembangunan manusia di Sumatera Barat memiliki laju yang positif kedepannya. Pada jangka panjang tentu pembangunan IPM ini akan meningkatkan keterampilan manusia dan perekonomian di Sumatera Barat (BPS, 2016).

Menurut UNDP (2004), untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah tinggi, seseorang membutuhkan keterampilan (skill) yang memadai. Keterampilan yang memadai bisa diperoleh melalui pendidikan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menempatkan pendidikan sebagai aspek penting dalam pembangunan. Hal itu dibuktikan dengan berbagai usaha yang dilakukan pemerintah sejak orde lama hingga era reformasi. Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan tentang “mencerdaskan kehidupan bangsa,” yang terkait dengan pendidikan.

Seberapa besar komitmen pemerintah terhadap pembangunan pendidikan antara lain tercermin dari anggaran pendidikan yang disediakan dalam APBN. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tertuang di dalam UU No 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD” (Kacaribu, 2013).

Pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan dan sektor kesehatan di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2007 – 2016 terus mengalami kenaikan, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016. Ini mencerminkan keseriusan pemerintah Sumatera Barat dalam meningkatkan pembangunan manusia yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia (BPS, 2016). Menurut

Mangkoesoebroto (2001), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah.

Pemerintah yang menetapkan suatu kebijakan tertentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Diharapkan Investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan. Kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Kacaribu, 2013).

Kemiskinan dapat memberikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang bermula dari ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Hal tersebut menjadikan pembangunan manusia melalui pendidikan

dan kesehatan pun menjadi tidak mungkin dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik (Mirza, 2012).

Dari sudut pandang ekonomi, masalah kemiskinan akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini pada akhirnya akan berimbas pada terbatasnya upah atau pendapatan yang mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah.

Persentase kemiskinan di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2007 – 2014 mengalami penurunan tiap tahun. Ini membuktikan bahwa realisasi pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan dan sektor kesehatan berhasil meningkatkan pembangunan manusia, yang nantinya secara otomatis akan menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat (BPS, 2016). Kemiskinan merupakan masalah besar dalam pembangunan manusia. Pada umumnya penduduk miskin tidak mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak serta tidak menikmati hidup yang sehat. Pada akhirnya tercipta SDM yang tidak berkualitas, memiliki produktivitas rendah, kekurangan gizi dan rentan mengalami penyakit, selain itu tingkat upah penduduk miskin rendah.

Dalam lanjutannya IPM serta pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan terpengaruh, karena alasan inilah sangat diperlukan andil pemerintah dalam memberantas kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin. Dalam sektor pendidikan pemerintah dapat memberlakukan wajib belajar 12 tahun dan kesempatan bagi pelajar kurang

mampu yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Menciptakan sekolah keterampilan bagi penduduk miskin yang putus sekolah terutama yang sudah termasuk angkatan kerja.

Dalam sektor kesehatan pemerintah dapat memberikan asuransi kesehatan, peranan pemerintah inilah yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan (Usmaliadanti, 2011). Besarnya pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan maupun sektor kesehatan akan mempengaruhi pembangunan manusia yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia. Meningkatnya indeks pembangunan manusia akan mengurangi tingkat kemiskinan secara alami yang akan berlanjut pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Usmaliadanti, 2011). Pendapat ini didukung oleh Mirza (2012), berpendapat paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di setiap negara.

1.2. Rumusan Masalah

Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya dilihat dari besarnya tingkat gross domestic bruto (GDB). Pembangunan tersebut juga dapat dilihat dari tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Pembangunan manusia merupakan suatu bentuk investasi modal manusia untuk ikut serta dalam pembangunan nasional. Oleh karenanya dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia.

Salah satu bukti keseriusan pemerintah tersebut adalah lewat pengeluaran pemerintah yang merupakan cerminan bukti nyata peran pemerintah dalam

mengatur perekonomian. Sektor pengeluaran pemerintah yang cukup penting dan berpengaruh terhadap pembangunan manusia adalah pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Berhasil atau tidaknya pembangunan dapat diukur dari IPM, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan (Usmaliadanti, 2011).

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Berapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pendidikan terhadap IPM di provinsi Sumatera Barat tahun 2007 – 2016 ?
2. Berapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah disektor kesehatan terhadap IPM di provinsi Sumatera Barat tahun 2007 – 2016 ?
3. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap IPM di provinsi Sumatera Barat tahun 2007 – 2016 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Mengkaji pengeluaran pemerintah disektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), yang dilihat dari indeks pendidikan di Sumatera Barat tahun 2007 - 2016.
2. Mengkaji pengeluaran pemerintah disektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), yang dilihat dari indeks harapan hidup di Sumatera Barat tahun 2007 – 2016.
3. Mengkaji pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), yang dilihat dari jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat tahun 2007 - 2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu :

1. Sebagai bahan masukan bagi penelitian – penelitian sejenis mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Sumatera Barat tahun 2007 - 2016.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan anggaran pengeluaran dalam dunia pendidikan dan kesehatan guna menekan angka kemiskinan secara maksimal serta meningkatkan IPM.
3. Sebagai informasi tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas terutama bagi mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi tentang pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan terhadap Peningkatan IPM dalam menurunkan angka kemiskinan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Topik utama dalam penelitian ini yaitu analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PP_P), kesehatan (PP_K) dan tingkat kemiskinan (K) terhadap IPM di provinsi Sumatera Barat.

1.6. Sistematika Penelitian

Secara garis besar, sistematika penelitian ini terdiri dari enam bab, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari enam sub bab, yaitu : latar belakang dari penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Teoritis

Tinjauan Teoritis terdiri dari empat sub bab, yaitu : landasan teori yang berkaitan dengan variable – variable yang diteliti, penelitian terdahulu, kerangka penelitian serta hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III : Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian terdiri dari empat sub bab, yaitu : jenis dan sumber data, variabel dan defenisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian, spesiikasi model penelitian dan metode analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Penelitian

Gambaran umum penelitian terdiri dari dua sub bab, yaitu : gambaran mengenai lokasi penelitian dan gambaran umum variable yang digunakan dalam penelitian.

BAB V : Hasil Dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan terdiri dari empat sub bab, yaitu : pemilihan model, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan estimasi model.

BAB VI : Penutup

Penutup terdiri dari dua sub bab, yaitu : kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dan saran yang nantinya diharapkan berguna bagi pihak – pihak yang berkepentingan.